

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah suatu institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas baik, terjangkau, dan profesional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, memberikan kesempatan kepada rumah sakit untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

RSUD Dokter Rubini Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD Dokter Rubini sebagai rumah sakit umum daerah yang berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, memerlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang didukung perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan. Era globalisasi yang terjadi menyebabkan arus informasi berjalan dengan cepat sejalan dengan masyarakat yang semakin kritis dan menuntut pelayanan kesehatan yang semakin baik dan memuaskan.

Peran tersebut dewasa ini semakin jelas mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah atau disingkat RSUD Dokter Rubini Mempawah dengan kualifikasi Rumah Sakit Type C terletak diatas tanah seluas 22.500 m² dengan bangunan

yang didirikan pada tahun 1981 serta beroperasi tahun 1984 dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini seluas 6.595,61 m² berada di jalan Raden Kusno No.1 Mempawah Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir dan mempunyai jumlah tempat tidur sebanyak 109 tempat tidur.

Wilayah disperse atau jangkauan pelayanan RSUD Dokter Rubini Mempawah meliputi Kabupaten Mempawah hingga Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang. RSUD Dokter Rubini Mempawah sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mempawah di bidang pelayanan kesehatan dan satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RSUD Dokter Rubini merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang mulai beroperasi sejak tahun 1987. RSUD Dokter Rubini merupakan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka pengelolaan rumah sakit merupakan pola pengelolaan birokrasi sehingga membutuhkan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak agar pengelolaannya menjadi sehat dan berkualitas sehingga bisa menghadapi persaingan dan perkembangan zaman. Perubahan peraturan serta perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat mendorong lingkungan internal rumah sakit untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Komitmen dan peran aktif anggota organisasi di rumah sakit diuji agar bisa melakukan perubahan secepat perubahan lingkungan eksternal. Tuntutan dari *stakeholders* turut mendorong perubahan kinerja rumah sakit sehingga lebih terarah demi mewujudkan rumah sakit yang berkualitas.

Sebagai Institusi pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah 2020- 2024 ini merupakan rencana strategis dan gambaran program lima tahunan yang mencakup penjabaran visi, misi, dan program strategis, pengukuran pencapaian kinerja rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Dokter Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Dokumen RENSTRA BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun berdasarkan pada Tugas dan fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan sehingga agenda meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mempawah dapat tercapai.

Penyusunan RENSTRA BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi, perumusan rancangan RENSTRA. Tersusunnya RENSTRA BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 diharapkan mampu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, Sehingga RSUD Dokter Rubini Mempawah diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan salah satu agenda prioritas Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Bab 1 pasal 1 ayat (11) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RENJA SKPD) adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu pada ayat (11) tersebut bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Mempawah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mempawah

tentunya mempunyai kewajiban menyusun Program Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut RSUD Dokter Rubini Mempawah untuk setiap tahunnya melaksanakan penyusunan Program Kerja yang mengacu pada Renstra BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah dan RPJMD Kabupaten Mempawah serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah serta memperhatikan Visi Kabupaten Mempawah yaitu **”Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan”** .

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan penjabaran secara rinci dari visi dan misi Rumah Sakit yang mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024.

Dengan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Oleh sebab itu Renstra BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan (kapan). Renstra BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024, dimana Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dalam menggambarkan permasalahan di RSUD Dokter Rubini Mempawah kemudian mengatasinya dengan membuat indikasi daftar program/kegiatan sebagai jalan keluar atau solusi pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan secara bertahap tahun demi tahun melalui sumber pembiayaan APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun sesuai dengan alur pikir penyusunan Renstra yang mengarahkan tujuan dan sasaran untuk pencapaian visi dan misi yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat diaplikasikan dan realistis, baik dalam rencana kerja, rencana operasional maupun anggaran berbasis kinerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar dapat meningkatkan kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
- Untuk menjamin komitmen bersama unsur pimpinan dan bawahan terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

- Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan instansi (Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- Menjadi payung hukum bagi unit kerja dalam pembiayaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah (budgeting).
- Menjadi alat kendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Pimpinan atau Direktur RS.

1.2 Landasan Hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), lingkup perencanaan pembangunan dibagi menjadi tiga jenis perencanaan, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 Tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 Tahun.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Sebagai dasar dalam penyusunan RPJM maka Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah ini di buat dan secara keseluruhan akan di rekap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Hubungan Renstra-SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Dokter RUBINI Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2020 - 2024, maka Rencana Strategis tersebut Merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan selama lima tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mempawah selama 5 tahun periode 2020-2024.

Rencana Strategis juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud.

1. Sebagai arah dalam pengembangan RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi Rumah Sakit rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen RSUD Dokter Rubini Mempawah dalam melaksanakan tugasnya.

1.3.2. Tujuan.

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Rubini Mempawah sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Sebagai petunjuk dalam melaksanakan kebijakan alokasi sumber daya rumah sakit untuk pencapaian visi dan misi rumah sakit.
3. Sebagai pedoman dalam rangka pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran rumah sakit.
4. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Dokter Rubini Mempawah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan menjadi RKA SKPD, dimana selanjutnya RKA menjadi draft APBD.
5. Untuk menyamakan persepsi dan tata cara serta komitmen seluruh insan rumah sakit dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Kerja RSUD Dokter Rubini Mempawah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan Renstra BLUD RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020- 2024 terdiri dari :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB.III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB.VII PENUTUP

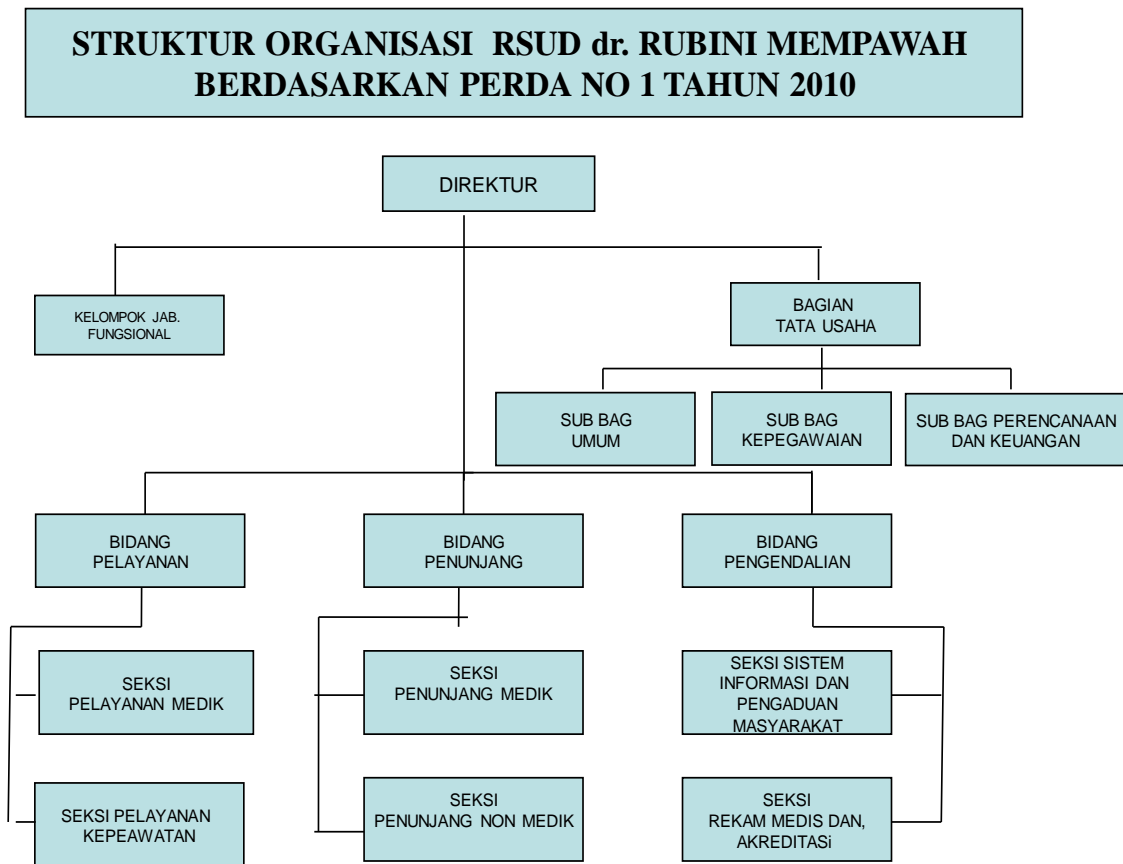
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi SKPD

Gambar 2.1
Struktur Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah



B. Tugas Dan Fungsi.

RSUD Dokter Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas RSUD Dokter Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Mempawah No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002.

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas RSUD Dokter Rubini Mempawah juga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dan dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing struktur organisasi mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin RSUD Dokter Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga RSUD Dokter Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan ;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana ;
- 4) Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
- 5) Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga RSUD Dokter Rubini Mempawah ;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah ;
- 7) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah ;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan ;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
 - 6) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
 - 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;
 - 5) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan.
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala bidang Penunjang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
- 4) Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
- 5) Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
- 6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
- 7) Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
- 8) Pelaksanaan audit klinik dan akreditasi ;
- 9) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
- 10) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pengendalian ;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik dan penunjang medik.

RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Adapun Rekapitulasi Ketenagaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2020 dan Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kepangkatan / Golongan PNS dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH BERDASARKAN JENJANG
PENDIDIKAN PER 31 DESEMBER 2021

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH | | TOTAL |
|----|---|--------|---------|-------|
| | | PNS | NON PNS | |
| 1 | S2 /PROFESI DOKTER SPESIALIS | | | |
| | 1 SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 1 | 0 | 1 |
| | 2 SPESIALIS BEDAH | 2 | 1 | 3 |
| | 3 SPESIALIS ANAK | 1 | 1 | 2 |
| | 4 SPESIALIS KANDUNGAN | 1 | 0 | 1 |
| | 5 SPESIALIS ANESTESI | 1 | 0 | 1 |
| | 6 SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | 0 | 1 |
| | 7 SPESIALIS SARAF | 1 | 1 | 2 |
| | 8 SPESIALIS PARU | 1 | 0 | 1 |
| | 9 SPESIALIS KESEHATAN JIWA | 1 | 0 | 1 |
| | 10 SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | 1 | 0 | 1 |
| | 11 SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI | 1 | 0 | 1 |
| | 12 SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK | 1 | 0 | 1 |
| | 13 SPESIALIS THT DAN KL | 0 | 1 | 1 |
| | 14 SPESIALIS RADIOLOGI | 0 | 0 | 0 |
| | 15 SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI | 0 | 1 | 1 |
| | 16 SPESIALIS MATA | 0 | 1 | 1 |
| 2 | S2 KESEHATAN | 6 | 0 | 6 |
| 3 | S2 ADMINISTRASI PUBLIK | 4 | 0 | 4 |
| 4 | S2 GIZI | 1 | 0 | 1 |
| 5 | S2 KEBIDANAN | 1 | 0 | 1 |
| 6 | S1 FARMASI/APOTEKER | 6 | 3 | 9 |
| 7 | S1 KEDOKTERAN UMUM | 17 | 2 | 19 |
| 8 | S1 KEDOKTERAN GIGI | 1 | 0 | 1 |
| 9 | S1 KEPERAWATAN/NERS | 29 | 16 | 45 |
| 10 | S1 KEPERAWATAN (NON NERS) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | S1 GIZI | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | 0 | 3 |
| 13 | S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL | 1 | 0 | 1 |
| 14 | S1 EKONOMI | 6 | 1 | 7 |
| 15 | S1 HUKUM | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S1 TEKNIK | 1 | 0 | 1 |
| 17 | S1 TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 1 | 1 |
| 18 | S1 AKUNTANSI | 0 | 1 | 1 |
| 19 | DIV KEPERAWATAN | 19 | 0 | 19 |
| 20 | DIV KEBIDANAN | 7 | 0 | 7 |
| 21 | DIV RADIOLOGI | 3 | 0 | 3 |
| 22 | DIV FISIOTERAPI | 1 | 0 | 1 |
| 23 | DIV KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | 1 | 3 |
| 24 | DIV ANALISIS KESEHATAN | 3 | 1 | 4 |
| 25 | DIV ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 1 | 1 |
| 26 | DIII KEPERAWATAN | 70 | 36 | 106 |
| 27 | DIII KEBIDANAN | 13 | 13 | 26 |
| 28 | DIII KESEHATAN GIGI | 3 | 2 | 5 |
| 29 | DIII ANESTESI | 1 | 0 | 1 |
| 30 | DIII FARMSI | 13 | 11 | 24 |
| 31 | DIII ANALIS KESEHATAN | 12 | 5 | 17 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 32 | DIII KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 |
| 33 | DIII REKAM MEDIS | 9 | 7 | 16 |
| 34 | DIII FISIOTERAPI | 1 | 2 | 3 |
| 35 | DIII GIZI | 8 | 1 | 9 |
| 36 | DIII RADIOLOGI | 3 | 1 | 4 |
| 37 | DIII ELEKTROMEDIK | 1 | 1 | 2 |
| 38 | DIII REFRAKSI OPTISIEN | 1 | 0 | 1 |
| 39 | DIII TEKNIK ELEKTRO | 1 | 0 | 1 |
| 40 | DIII KEUANGAN | 1 | 2 | 3 |
| 41 | DIII INFORMATIKA | 0 | 1 | 1 |
| 42 | D1 KEBIDANAN | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SPK | 2 | 0 | 2 |
| 44 | SLTA SEDERAJAT | 41 | 27 | 68 |
| 45 | SLTP SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SD SEDERAJAT | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | | 308 | 143 | 451 |

Tabel 2.2
Ketenagaan/Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Menurut jenis Pekerjaan/Profesi Tahun
2021

| NO | TENAGA KESEHATAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------------|------------|
| 1 | DOKTER SPESIALIS | 19 |
| 2 | DOKTER UMUM | 18 |
| 3 | DOKTER GIGI UMUM | 2 |
| 4 | PERAWAT | 164 |
| 5 | ASISTEN PENATA ANESTESI | 3 |
| 6 | PERAWAT GIGI | 5 |
| 7 | BIDAN | 34 |
| 8 | APOTEKER | 7 |
| 9 | ASISTEN APOTEKER | 24 |
| 10 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 4 |
| 11 | ANALIS KESEHATAN | 21 |
| 12 | NUTRISIONIS | 10 |
| 13 | FISIOTERAPIS | 4 |
| 14 | PEREKAM MEDIS | 14 |
| 15 | ELEKTROMEDIK | 2 |
| 16 | RADIOGRAFER | 7 |
| 17 | REFRAKSIONIS | 0 |
| 18 | PENYULUH KESEHATAN | 1 |
| 19 | MANAJEMEN | 12 |
| 20 | FUNGSIONAL UMUM | 100 |
| JUMLAH | | 451 |

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang mendukung Pelayanan Kesehatan di RSUD Dokter Rubini Mempawah yaitu :

1. Gedung Administrasi – Gedung Pelayanan Rawat jalan (Poliklinik)
2. Gedung Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
3. Gedung Pelayanan Rawat Inap

4. Gedung Penunjang Pelayanan antara lain :

- Laboratorium
- Radiologi / Ruang USG
- Farmasi
- Fisioterapi
- Kaonsultasi Gizi
- Gudang Oksigen
- IPSRS
- Laundry
- CSSD
- IPAL
- Dapur
- Kamar Jenazah
- Ruang Incenerator
- Ruang Genset
- Ambulance
- Mushollah

2.3 Kinerja RSUD dr. Rubini

Dari pelayanan yang telah dilaksanakan, kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah yang telah dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Nilai Capaian | Skala Pengukuran Ordinal | | | |
|----|---|---------------|--------------------------|---|----|----|
| | | | SB | B | CB | TB |
| 1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 89,12 | SB | | | |

Hasil capaian **Formulir Pengukuran Kinerja** dari 1 (satu) sasaran adalah sebesar **89,12%** dengan keterangan **Sangat berhasil.**

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran akan disajikan sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat |
|---------------------|---|

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Sasaran tersebut dicapai melalui strategi berupa **3 (tiga) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 berjumlah 6 (enam) kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pertama diantaranya:

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD
6. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Jabupaten / Kota. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Nilai Capaian (%) |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | BOR | 60% | 41,99% | 69,98 |
| | | BTO | 50 Kali | 44,85 Kali | 89,70 |
| | | ALOS | < 5 Hari | 3,4 Hari | 100,00 |
| | | TOI | 3 Hari | 5 Hari | 63,83 |
| | | GDR | <0,025 permill | <0,022 permill | 100,00 |
| | | NDR | <0,045 permill | <0,014 permill | 100,00 |
| | | IKM | 80 Nilai | 80,25 Nilai | 100,31 |
| Nilai Capaian Kinerja Sasaran | | | | | 89,12 |
| Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil | | | | | |

Untuk mencapai mencapai Sasaran I, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada tahun 2021 ini dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Efisiensi (%) |
|----|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 22.237.806.700,00 | 19.980.975.523,00 | 89,85 | 89,12 | N/A |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 49.102.000.481,00 | 36.717.666.904,00 | 74,78 | | N/A |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 4.820.000.000,00 | 2.419.285.708,00 | 50,19 | | N/A |
| | | JUMLAH | 76.159.807.181,00 | 59.117.928.135,00 | | | |
| | | | Rata-rata | | 77,62 | 89,12 | - |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 77,62% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 89,12%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dan optimal dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%.

Dalam upaya merealisasikan sasaran ini, pada tahun anggaran 2021 telah ditetapkan untuk melaksanakan **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Didalam program ini termuat 6 (enam) kegiatan yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Peningkatan Pelayanan BLUD.

6. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Jabupaten / Kota.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat diketahui melalui perkembangan BOR, BTO dan LOS serta TOI.

1) Bed Occupansy Rate (BOR)

Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

$$\text{BOR} = \text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}$$

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit} \times 100 \%}{\text{Jumlah TT} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}}$$

Nilai Parameter BOR yang ideal adalah antara **60 – 85 %**

$$\text{BOR} = (15.643 / (87 \times 366)) \times 100\% = 49,13\% \text{ Tahun 2020}$$

$$\text{BOR} = (13.643 / (89 \times 365)) \times 100\% = 41,99\% \text{ Tahun 2021}$$

Realisasi Bed Occupansy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit pada tahun 2021 adalah sebesar 41,99 atau mencapai 69,98% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 adalah sebesar 49,13 atau mencapai 81,88% kurang dari target yang ditetapkan sebesar 60%, sehingga Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,14 dari Tahun 2020 dan masih cukup optimal dalam pemakaian tempat tidur dalam jumlah hari yang dirawat.

Hal ini berarti pemanfaatan tempat tidur ini masih dalam jumlah hari perawatan di rumah sakit belum optimal bila dilihat dari nilai Parameter BOR yang ideal 60-85%.

2) Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.

Hal ini dilihat dari rumus BTO ;

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah Pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}}$$

$$\text{BTO} = 4632/87 = 53,24 \text{ Kali Tahun 2020}$$

$$\text{BTO} = 3992/89 = 44,85 \text{ Kali Tahun 2021}$$

Ideal dalam satu tahun, 1 (satu) tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Perkembangan Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada tahun 2021 terealisasi sebesar 44,85 kali atau mencapai 89,70% dan mengalami penurunan sebesar 8,39 kali lebih rendah dari target sebesar 50 kali, sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar 53,24 kali atau mencapai 106,48% lebih tinggi dari target sebesar 40 kali. Ini menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur Tahun 2021 cukup baik karena jenis penyakit dan perawatan yang berbeda karena terjadinya pandemi Covid 19 sehingga membutuhkan tindakan perawatan yang khusus bila dibandingkan dari yang ditargetkan. Sementara bila dibandingkan dengan Tahun 2020 frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode sangat tinggi atau melebihi dari yang direncanakan rata-rata 40-50 kali.

Adapun penyebab hal ini dikarenakan ada beberapa penyakit yang diderita pasien memerlukan perawatan yang cukup lama.

Disamping itu masih diperlukan juga penanganan dalam permasalahan diatas diperlukan pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta penunjang medis lainnya untuk menegakkan diagnosa, selain itu perlu penambahan tenaga dokter spesialis dan tenaga harian lepas kesehatan

yang belum ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.

3) Average Length Of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut.

Average Length Of Stay (LOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit. Adapun perhitungannya adalah :

$$\text{ALOS} = \frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}$$

Nilai ALOS yang ideal antara 6 – 9 hari.

ALOS = 15.649/4632 = 3,37 hari Tahun 2020

ALOS = 13.606/3992 = 3,4 hari Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien realisasinya adalah 3,4 hari atau mencapai 100,00% dari < 5 hari yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2020 adalah selama 3,37 hari atau mencapai 56,17% dari 3 hari yang ditargetkan.

Ini menunjukkan bahwa proses pengobatan pasien rawat inap di rumah sakit ini masih cukup optimal dan baik dari rata-rata nilai Alos yang ideal sehingga diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan lagi tingkat efektifitas dan mutu pelayanannya.

4) Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

$$\text{TOI} = \frac{(\text{Jumlah TT} \times \text{Periode}) - \text{hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi pada kisaran 1 – 3 hari.

$$\text{TOI} = (87 \times 366) - 15643 / 4632 = 3,49 \text{ Hari Tahun 2020}$$

$$\text{TOI} = (89 \times 365) - 13643 / 3992 = 4,7 \text{ Hari Tahun 2021}$$

Bila dilihat dari Turn Over Interval (TOI) itu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati pada Tahun 2021 mencapai 4,7 hari atau lebih dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai lebih 63,83% masih tinggi walaupun cukup optimal bila dibandingkan Tahun 2020 mencapai 3,5 hari dari 3 hari yang ditargetkan atau mencapai 85,71%. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 21,88 karena adanya pandemi Covid 19 dan di rumah sakit diwajibkan untuk menyediakan fasilitas ruang isolasi untuk pasien yang reaktif positif untuk ditangani sehingga pemakaian jumlah tempat tidur cukup tinggi. Sedangkan jumlah pasien yang sakit mengalami kenaikan, ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur masih cukup baik.

5) Gross Death Rate (GDR)

Meningkatnya derajat pelayanan kesehatan dapat dilihat dari Gross Death Rate (GDR). Target GDR Tahun 2021 sebesar <0,025 /mill dengan realisasi Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,022/mill atau mencapai 100,00% yang mengalami penurunan sebesar 0,21 ini masih baik dan optimal, bila dibandingkan Gross Death Rate (GDR) pada

Tahun 2020 sebesar 0,23 permill atau mencapai 92% dari sebesar <25% permill yang ditargetkan.

Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

$$\text{GDR} = 113/4632 \times 1000 = 0,23/ \text{ mill Tahun 2020}$$

$$\text{GDR} = 87/3992 \times 1000 = 0,022/ \text{ mill Tahun 2021}$$

6) Net Death Rate (NDR)

Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambar mutu pelayanan dirumah sakit.

$$\text{NDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000 \%$$

Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000.

$$\text{NDR} = 73/4632 \times 1000 = 0,16/ \text{ mill Tahun 2020}$$

$$\text{NDR} = 54/3992 \times 1000 = 0,014/ \text{ mill Tahun 2021}$$

Begitu juga halnya dengan Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar pada tahun 2021 adalah sebesar 0,014/mill atau mencapai 100,00% dari sebesar <0,045/mill yang ditargetkan, ini cukup baik karena kurang dari 0,15 /mill . NDR pada tahun 2020 adalah sebesar 0,16/mill atau mencapai 35,56% dari sebesar 10% per 1000 yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami kematian setelah dirawat cukup rendah dari

target. Ini berarti mutu pelayanan terhadap pasien di rumah sakit semakin meningkat dan membaik dalam pelayanan kesehatan.

A. Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan

Tabel 2.3

Kunjungan Rawat Jalan Poli Klinik Per Tahun

| TAHUN | JENIS PASIEN | | | | JUMLAH | HARI KERJA | RATA- RATA /HARI |
|-------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------------|------------------|
| | UMUM | BPJS/Jaminan lainnya | LK | PR | | | |
| 2019 | 5.415 | 22.035 | 17.782 | 19.341 | 27.450 | 248 | 111 |
| 2020 | 7.324 | 20.034 | 13.416 | 13.942 | 27.358 | 250 | 109 |
| 2021 | 9.964 | 25919 | 17358 | 25919 | 35.883 | 227 | 158 |

Tabel 2.4

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Berdasarkan Tidak Lanjut Pelayanan

| TAHUN | JUMLAH PASIEN | RATA RATA/ HARI | TINDAK LANJUT PERAWATAN | | | |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| | | | DIRAWAT | DIRUJUK | PULANG | MATI SEBELUM (DOA) DAN SAAT DIRAWAT |
| 2019 | 17.128 | 47 | 7.855 | 135 | 9.052 | 86 |
| 2020 | 15.212 | 42 | 5.687 | 198 | 9.171 | 156 |
| 2021 | 14629 | 40 | 3.897 | 44 | 10.595 | 93 |

Tabel 2.5

**JUMLAH PASIEN PER POLIKLINIK RAWAT JALAN
DAN RAWAT JALAN IGD PER TAHUN**

| NO | POLI | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | Umum | BPJS | LK | PR | Total | Umum | BPJS | LK | PR | Total | Umum | BPJS | LK | PR | Total |
| 1 | PENYAKIT DALAM | 915 | 6.509 | 3110 | 4314 | 7.424 | 437 | 5431 | 2450 | 3418 | 5868 | 532 | 6272 | 2686 | 4118 | 6804 |
| 2 | BEDAH | 211 | 966 | 615 | 562 | 1177 | 254 | 1618 | 1041 | 834 | 1872 | 285 | 1767 | 1121 | 931 | 2052 |
| 3 | KANDUNGAN | 525 | 899 | 0 | 1422 | 1422 | 484 | 951 | 8 | 1427 | 1435 | 317 | 756 | 7 | 1066 | 1073 |
| 4 | ANAK | 881 | 1400 | 1198 | 1083 | 2281 | 698 | 1041 | 905 | 834 | 1739 | 698 | 1259 | 1073 | 884 | 1957 |
| 5 | GIGI DAN MULUT ANAK | 131 | 502 | 265 | 368 | 633 | 62 | 335 | 182 | 215 | 397 | 78 | 452 | 238 | 292 | 530 |
| 6 | GIGI DAN MULUT DEWASA | 261 | 1296 | 578 | 979 | 1557 | 198 | 1240 | 575 | 863 | 1438 | 218 | 1413 | 570 | 1061 | 1631 |
| 7 | PARU DAN SAL. PERNAPASAN | 245 | 968 | 780 | 433 | 1213 | 255 | 921 | 723 | 453 | 1175 | 273 | 1089 | 829 | 533 | 1362 |
| 8 | SARAF | 191 | 1583 | 814 | 960 | 1774 | 271 | 2607 | 1417 | 1461 | 2878 | 431 | 6410 | 2752 | 3089 | 5841 |
| 9 | JIWA | 230 | 4.917 | 2975 | 2172 | 5147 | 283 | 2751 | 1739 | 1295 | 3034 | 272 | 5333 | 1480 | 1125 | 2605 |
| 10 | REHABILITASI MEDIK | 189 | 1836 | 872 | 1153 | 2.025 | 166 | 1871 | 974 | 1063 | 2037 | 154 | 3009 | 1414 | 1749 | 3163 |
| 11 | MATA (Refraksi Optisi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 626 | 321 | 414 | 735 |
| 12 | KULIT DAN KELAMIN | 117 | 318 | 193 | 242 | 435 | 83 | 325 | 232 | 176 | 408 | 100 | 407 | 222 | 285 | 507 |
| 13 | RAWAT JALAN IGD | 6071 | 3602 | 5091 | 4582 | 9673 | 2931 | 6594 | 5046 | 4479 | 9525 | 3434 | 7298 | 5398 | 5334 | 10732 |
| 14 | THT | 211 | 680 | 352 | 539 | 891 | 205 | 796 | 496 | 505 | 1001 | 198 | 751 | 404 | 545 | 949 |
| 15 | JANTUNG | 1 | 22 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MCU | 802 | 0 | 490 | 312 | 802 | 2470 | 75 | 1654 | 891 | 2545 | 4953 | 0 | 3134 | 1819 | 4698 |
| 17 | VCT | 583 | 63 | 440 | 206 | 646 | 1459 | 71 | 1021 | 509 | 1530 | 1523 | 99 | 1065 | 557 | 1622 |
| 18 | NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 273 | 1089 | 829 | 533 | 1362 |
| TOTAL | | 25561 | 11564 | 19341 | 17782 | 37.123 | 10256 | 26628 | 18463 | 18424 | 36.883 | 8895 | 34030 | 20409 | 22516 | 47.623 |

A. KEGIATAN PELAYANAN RAWAT INAP

Tabel 2.6
JUMLAH TEMPAT TIDUR TAHUN 2021

| NO | RUANG PERAWATAN | TEMPAT TIDUR AKTIF | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-----|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | KELAS | | | | | | | | Perawatan Khusus/ R.Observasi | | Jumlah Total |
| | | VIP | | I | | II | | III | | aktif | Tdk Akti/ cadangan | |
| Aktif | Tdk Aktif / cadangan | Aktif | Tdk aktif / cadangan | Aktif | Tdk aktif / Cadangan | Aktif | Tdk aktif/ cadangan | | | | | |
| 1. | ANGGREK | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 2. | BEDAH (KENANGA) | | | | | 4 | | 9 | | 1 | | 14 |
| 3. | PENYAKIT DALAM (PURING) | | - | - | - | 6 | - | 9 | | - | - | 15 |
| 4. | PARU DAN PERNAPASAN (NON ISO) | | - | - | - | 2 | - | 3 | | - | - | 5 |
| | • ISOLASI (MELATI) | | - | - | - | 4 | - | 6 | | - | - | 10 |
| 5. | KEBIDANAN (MAWAR) | | - | 3 | - | 3 | - | 10 | | - | - | 16 |
| | • ISOLASI (MAWAR) | | - | - | - | - | - | - | | 5 | - | 5 |
| 6. | ANAK (CEMPAKA) | | - | 2 | - | 4 | - | 12 | | - | - | 18 |
| | • ISOLASI (CEMPAKA) | | - | - | - | - | - | 4 | | - | - | 4 |
| 7. | PERINATOLOGI | | | | | | | | | | | |
| | • BABY BASKET | | - | - | | - | | - | | 10 | - | 10 |
| | • INKUBATOR | | - | - | | - | | - | | 4 | - | 4 |
| 8. | JAMKESMAS (ASOKA) | Dikondisikan untuk Perawatan Pasien Covid 19 | | | | | | | | 16 | - | 16 |
| | ISOLASI (ASOKA) | | | | | | | | | | | |
| 9. | ICU | | - | - | | - | | - | | 4 | - | 4 |
| 10. | IGD | | - | - | | - | | - | | 19 | - | 19 |
| TOTAL | | 4 | - | 15 | - | 23 | - | 53 | | 59 | - | 154 |

Keterangan :

Untuk penghitungan BOR menggunakan **92 Tempat Tidur**, karena dikurangi Tempat Tidur(TT) cadangan /tempat tidur Tidak Aktif, dan TT di Ruang Perinatologi, IGD dan ICU, serta Asoka (R.Isolasi Covid 19) Ruang Perinatologi dan ICU, BOR nya dihitung tersendiri.

Tabel 2.7

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP PER TAHUN

| NO | NAMA RUANGAN | TAHUN | | |
|-------|--------------|-------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Kenanga | 590 | 425 | 484 |
| 2 | Cempaka | 1280 | 581 | 580 |
| 3 | Perina | 903 | 886 | 806 |
| 4 | Asoka | 942 | 239 | |
| 5 | Anggrek | 765 | 617 | 502 |
| 6 | Puring | 729 | 787 | 776 |
| 7 | Mawar | 1903 | 1596 | 1373 |
| 8 | ICU | 218 | 195 | 158 |
| 9 | Melati | 487 | 387 | 277 |
| Total | | 7835 | 7817 | 4956 |

Untuk Tingkat Efisiensi Pengelolaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8
**INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP
PERTAHUN**

| Tahun | Jumlah tempat tidur aktif | Jumlah hari rawat | Iama dirawat | BOR (%) 60-85 | LOS (hari) 6-9 | BTO (kali) 40-50 | TOI (hari) 1-3 | NDR >48 Jam 0/00 < 25 | GDR 0/00 ≤ 45 |
|-------|---------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2017 | 86 | 18.168 | | 57,90 | 3,08 | 68 | 3,00 | 11,7 | 28,67 |
| 2018 | 116 | 20.467 | | 48,33 | 3,1 | 57,04 | 3,3 | 7,7 | 9,21 |
| 2019 | 116 | 21.154 | 20.980 | 50,0 | 3 | 58 | 3 | 6,12 | 16,87 |
| 2020 | 87 | 15643 | 15649 | 49,13 | 3,4 | 53 | 3,5 | 0,163 | 0,23 |
| 2021 | 124 | 16268 | 16227 | 42,0 | 3 | 45 | 5 | 0,014 | 0,022 |

Tabel 2.9
**EFISIENSI PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR DI RAWAT INAP PERUANGAN
TAHUN 2021**

| NO | RUANGAN | Jumlah tempat tidur aktif | Jumlah Pasien | Jumlah hari rawat | Lama di rawat | BOR (%) | LOS (hari) | TOI (hari) | BTO (kali) | NDR > 48 Jam 0/00 | GDR 0/00 |
|----|--------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| 1 | Kenanga | 13 | 484 | 1512 | 1512 | 31.9 | 3 | 7 | 37 | 0.006 | 0,006 |
| 2 | Puring | 15 | 776 | 3255 | 3255 | 59.5 | 4 | 3 | 52 | 0.031 | 0,031 |
| 3 | Melati | 15 | 277 | 1160 | 1185 | 21.2 | 4 | 16 | 18 | 0.058 | 0.072 |
| 4 | Anggrek | 14 | 502 | 2055 | 2055 | 40.2 | 4 | 6 | 36 | 0.020 | 0.020 |
| 5 | Asoka | ISOLASI COVID19 | | | | | | | | | |
| 6 | Mawar | 16 | 1373 | 3528 | 3528 | 60.4 | 3 | 2 | 86 | 0,001 | 0,001 |
| 7 | Cempaka | 26 | 580 | 2133 | 2133 | 36.5 | 4 | 6 | 36 | 0,007 | 0,009 |
| 8 | Perinatologi | 14 | 806 | 2102 | 2100 | 41.1 | 3 | 4 | 58 | 0,015 | 0,019 |
| 9 | ICU | 4 | 158 | 522 | 522 | 47.8 | 3 | 4 | 53 | 0,152 | 0,215 |

Tabel 2.10cx

**LAPORAN BELANJA APBD DAN APBN
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH 5 TAHUN TERAKHIR**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Anggaran Belanja (Rp) | 44.088.583,100 | 62.781.498.512 | 79.439.946.451 | 65.479.438.339 | 104.205.986.762 |
| Realisasi (Rp) | 40.824.848.077 | 59.736.051.617 | 76.546.242.197 | 61.811.979.659 | 86.088.116.062 |
| Persentase (%) | 94,07 | 95,15 | 96,36 | 95,15 | 82,61 |

Tabel 2.11

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH 5 TAHUN TERAKHIR**

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TARGET (Rp) | 14.000.000.000 | 16.000.000.000 | 18.000.000.000 | 20.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| REALISASI (Rp) | 15.685.019.739 | 17.859.136.350 | 25.255.352.039 | 31.959.587.641 | 46.969.066.220 |
| PERSENTASE (%) | 103,14 | 111,62 | 140,31 | 159,80 | 187,86 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan.

1. Jenis obat-obatan yang belum tersedia untuk kasus-kasus tertentu.
2. Bahan makanan dan minuman bagi pasien dipasaran Mempawah kurang variatif.
3. Pelaksanaan JAMKESMAS data verifikasi belum optimal, karena Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah melayani 3 Kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang.
4. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit masih belum optimal ditinjau dari segi latar belakang pendidikan formal untuk menunjang

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

5. Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah terbatas.

2.4.2 Peluang.

- 1.3.1.1** Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang berdekatan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang serta merupakan jalur Sutera menuju arah Utara di Provinsi Kalimantan Barat merupakan potensi strategis.
- 1.3.1.2** Kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan Rumah Sakit salah satu bidang unggulan melalui Visi Kabupaten Mempawah yaitu “ **Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan** “
- 1.3.1.3** Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit.
- 1.3.1.4** Adanya program jaminan kesehatan nasional (BPJS)
- 1.3.1.5** RSUD Dokter Rubini sebagai Rumah Sakit rujukan satu-satunya di Kabupaten Mempawah.
- 1.3.1.6** Adanya Peraturan Pemerintah yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan.
- 1.3.1.7** Menjadikan RSUD Dokter Rubini sebagai PPK-BLUD dengan status Penuh
- 1.3.1.8** Melaksanakan penyesuaian tarif dengan memperhatikan unit cost.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 2.12 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | |
| b | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | | | | 7 Dokumen | | | | | 7 Dokumen | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | | | | | 60 | 70 | 70 | 75 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian | | | | | 60 | 65 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah dokumen perencanaan | | | | | 80 | 85 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah dokumen RKA | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah dokumen perubahan RKA | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah dokumen DPA | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah dokumen perubahan DPA | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Penyusunan laporan keuangan semesteran | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | |
| c | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan manajemen aset / barang daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan | | | | | 85 | 90 | 95 | 95 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah gaji dan tunjangan | | | | | 85 | 90 | 95 | 95 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset/ barang daerah | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah dokumen laporan keuangan semester | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|----|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | 360 Stell | | | | | | | | | | | | | | 321 Stell | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | | | | | | 8 orang | | | | | | | | | | | | | | 1 orang | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase layanan administrasi kepegawaian | | | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah paket pakaian dinas | | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| b | jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan | | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | | | | 700 Lembar | | | | | | | | | | | | | | 700 Lembar | |
| b | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| c | Penyediaan alat tulis kantor | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| d | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| e | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| f | Penyediaan makanan dan minuman | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| g | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| h | Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | 80% |
| | Kerjasama Informasi dan Media Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i | Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| j | Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah | | | | | | 75% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah alat tulis kantor dan materai | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah paket alat dan bahan pembersih | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah paket makanan dan minuman | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah jenis surat kabar / koran | | | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|------------|----|----|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| g | Jumlah paket bahan pameran | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| h | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| i | Jumlah bahan untuk penataan arsip | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | | | | 7 Unit | | | | - | | | | | | | | | |
| b | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | 9 Unit | | | | 9 Unit | | | | | | | | | |
| c | Pengadaan meubeler | | | | 80% | | | | 80% | | | | | | | | | |
| d | Pengadaan alat studio dan komunikasi | | | | 80% | | | | 80% | | | | | | | | | |
| e | Pengadaan Komputer | | | | 10 Unit | | | | 10 Unit | | | | | | | | | |
| f | Pengadaan Rumah Dinas | | | | 4 Unit | | | | 4 Unit | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Persentase peningkatan sarana dan prasarana | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 | | | | 2 | 9 | 5 | 3 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah paket mebel | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah peralatan dan mesin | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah komputer, printer dan jumlah sewa rumah dinas untuk dokter | | | | 19 | 24 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 36 Dokumen | | | | 36 Dokumen | | | | | | | | | |
| b | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| c | Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/pengamanan kantor | | | | 4 orang | | | | 4 orang | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Persentase penyediaan jasa penunjang | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah jasa pengiriman | | | | 80 | 85 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah petugas keamanan kantor | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 80% | | | | | 80% | | | | | | | | | |
| c | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | | | 80% | | | | | 80% | | | | | | | | | |
| d | Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 26 Unit | | | | | 26 Unit | | | | | | | | | |
| e | Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor | | | | 80% | | | | | 80% | | | | | | | | | |
| f | Pemeliharaan rutin/berkala komputer | | | | 80% | | | | | 80% | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah mobil jabatan yang terpelihara | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi perizinana dan pajak | | | | 42 | 44 | 49 | 57 | | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah pemeliharaan mebel | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah pemeliharaan peralatan | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| g | Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah pelayanan kesehatan operasional BLUD | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit | | | | 100% | | | | | - | | | | | | | | | |
| b | Rehabilitasi bangunan rumah sakit | | | | 85% | | | | | 85% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---------|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| c | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | | | 80% | | | | | 80% | | | | | | | | | |
| d | Pengadaan obat-obatan rumah sakit | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| e | Pengadaan Mobil Ambulance / Jenazah | | | 1 Unit | | | | | - | | | | | | | | | |
| f | Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| g | Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| h | Pengadaan bahan laboratorium | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| i | Pengadaan bahan radiologi | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| j | Pengadaan Gas Medis | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| k | Pengadaan perlengkapan rumah sakit | | | 1 Tahun | | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| l | Pengadaan Alat-alat Kalibrasi | | | 70% | | | | | - | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| m | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | | | 65% | | | | | 65% | | | | | | | | | |
| n | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitari | | | 100% | | | | | - | | | | | | | | | |
| | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o | Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit | | | 100% | | | | | - | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan | | | | 60 | 70 | 75 | 78 | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah bangunan poli rumah sakit dalam peningkatan pelayanan | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah bangunan kesehatan rumah sakit yang sesuai standar pelayanan | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| c | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara | | | | 75 | 85 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit | | | | 14 | 17 | 20 | 24 | | | | | | | | | | |
| g | Jumlah pengadaan bahan habis pakai penunjang operasional rumah sakit | | | | 85 | 90 | 95 | 100 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| h | Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Terpelihara di Rumah Sakit | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| i | Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan | | | | 75 | 85 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | 75% | | | | 75% | | | | | | | | | |
| b | Promosi Kesehatan Rumah Sakit | | | | 80% | | | | 80% | | | | | | | | | |
| Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | | | |
| Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | 1 Tahun | | | | 1 Tahun | | | | | | | | | |
| Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f | Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | | | | 75% | | | | 75% | | | | | | | | | |
| Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g | Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | | | |
| h | Penguburan Pasien Tidak Mampu | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| a | Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| b | Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| c | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| d | Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat | | | | 76 | 77 | 78 | 80 | | | | | | | | | | |
| e | Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| f | Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | | |
| PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Rekam Medis | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| a | Jumlah pelayanan rekam medis | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit | | | | 80% | | | | 80% | | | | | | | | | |
| | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas | | | | 4 Kali | | | | - | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan | | | | | 85 | 90 | 95 | 95 | | | | | | | | | |
| a | Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit kegiatan pelatihan workshop rumah sakit yang sesuai standar | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengembangan SDM Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan | | | | 80% | | | | 80% | | | | | | | | | |
| | Bimbingan teknis tenaga kesehatan | | | | 80% | | | | - | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan | | | | 4 | | | | - | | | | | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan SDM kesehatan | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | |
| | Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas | | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | | | | | | | | | |

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 55.000.000,00 | | | | | 29.873.425,00 | | | | | 54,32 | | | | | 54.000.000,00 | 29.873.425,00 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 25.000.000,00 | | | | | 14.933.550,00 | | | | | 59,73 | | | | | 24.500.000,00 | 14.933.550,00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 30.000.000,00 | | | | | 14.939.875,00 | | | | | 49,80 | | | | | 29.500.000,00 | 14.939.875,00 |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | - | 57.468.929.205,00 | 60.615.038.165,00 | 65.685.392.074,00 | 67.981.613.177,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.789.113.073,23 | - |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 50.500.000,00 | 61.000.000,00 | 66.500.000,00 | 78.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.715.000,00 | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 4.950.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 4.950.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 4.950.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 | 8.500.000,00 | | | | | | - | | | | | 5.415.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 4.950.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 25.000.000,00 | 35.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 24.500.000,00 | - |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan | 25.522.223.109,00 | | | | | 23.640.816.778,00 | | | | | 92,63 | | | | | 25.522.223.109,00 | 23.640.816.778,00 |
| Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 15.000.000,00 | | | | | 14.955.800,00 | | | | | 99,71 | | | | | 14.780.385,00 | 14.955.800,00 |
| Peningkatan manajemen aset / barang daerah | 15.000.000,00 | | | | | 14.955.800,00 | | | | | 99,71 | | | | | 14.780.385,00 | 14.955.800,00 |
| Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 30.000.000,00 | - | - | - | - | 19.879.650,00 | | | | | 66,27 | | | | | 29.200.000,00 | 19.879.650,00 |
| Penyusunan laporan keuangan semesteran | 10.000.000,00 | | | | | 4.989.775,00 | | | | | 49,90 | | | | | 9.700.000,00 | 4.989.775,00 |
| Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 20.000.000,00 | | | | | 14.889.875,00 | | | | | 74,45 | | | | | 19.500.000,00 | 14.889.875,00 |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 27.372.702.005,00 | 28.750.162.105,00 | 30.196.077.711,00 | 31.703.879.846,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.055.663.206,54 | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 27.316.202.005,00 | 28.682.012.105,00 | 30.116.112.711,00 | 31.621.918.346,00 | | | | | | - | | | | | 26.999.982.821,54 | - |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | | 16.500.000,00 | 18.150.000,00 | 19.965.000,00 | 21.961.500,00 | | | | | | - | | | | | 16.280.385,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 24.650.000,00 | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | | 15.000.000,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | | | | - | | | | | 14.750.000,00 | - |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 180.000.000,00 | | | | | 144.499.000,00 | | | | | | | | | | 176.526.720,00 | 144.499.000,00 |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 180.000.000,00 | | | | | 144.499.000,00 | | | | | | | | | | 176.526.720,00 | 144.499.000,00 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000,00 | | | | | 1.250.000,00 | | | | | 1,25 | | | | | 97.926.400,00 | 1.250.000,00 |
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 100.000.000,00 | | | | | 1.250.000,00 | | | | | 1,25 | | | | | 97.926.400,00 | 1.250.000,00 |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | 336.000.000,00 | 385.200.000,00 | 462.240.000,00 | 554.688.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.453.120,00 | - |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya | | 216.000.000,00 | 241.200.000,00 | 289.440.000,00 | 347.328.000,00 | | | | | | - | | | | | 212.526.720,00 | - |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 120.000.000,00 | 144.000.000,00 | 172.800.000,00 | 207.360.000,00 | | | | | | - | | | | | 117.926.400,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------------------|
| Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota | | 720.000.000,00 | 800.000.000,00 | 850.000.000,00 | 960.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 710.400.000,00 | - |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistem Informasi Kesehatan | 250.000.000,00 | | | | | 195.166.050,00 | | | | | | | | | | | | 246.339.750,00 | 195.166.050,00 |
| Peningkatan Rekam Medis | 250.000.000,00 | | | | | 195.166.050,00 | | | | | | | | | | | | 246.339.750,00 | 195.166.050,00 |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | 275.000.000,00 | 302.500.000,00 | 332.750.000,00 | 366.025.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271.339.750,00 | - |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | 275.000.000,00 | 302.500.000,00 | 332.750.000,00 | 366.025.000,00 | | | | | | | | | | | | | 271.339.750,00 | - |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 100.000.000,00 | | | | | 51.718.750,00 | | | | | | | | | | | | 98.535.900,00 | 51.718.750,00 |
| Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit | 100.000.000,00 | | | | | 51.718.750,00 | | | | | | | | | | | | 98.535.900,00 | 51.718.750,00 |
| Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 800.000.000,00 | | | | | - | | | | | | | | | | | | 786.852.800,00 | - |
| Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit | 200.000.000,00 | | | | | - | | | | | | | | | | | | 786.852.800,00 | - |
| Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas | 600.000.000,00 | | | | | - | | | | | | | | | | | | 591.000.000,00 | - |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | - | 770.000.000,00 | 871.000.000,00 | 963.100.000,00 | 1.046.410.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 759.535.900,00 | - |
| Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | 770.000.000,00 | 871.000.000,00 | 963.100.000,00 | 1.046.410.000,00 | | | | | | | | | | | | | 759.535.900,00 | - |
| PERMENDAGRI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengembangan SDM Kesehatan | 1.120.000.000,00 | | | | | 71.716.595,00 | | | | | | | | | | | | 1.097.080.430,00 | 71.716.595,00 |
| Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan | 1.000.000.000,00 | | | | | 71.716.595,00 | | | | | | | | | | | | 1.097.080.430,00 | 71.716.595,00 |
| Bimbingan teknis tenaga kesehatan | 70.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.548.480,00 | - |
| Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.267.950,00 | - |
| PERMENDAGRI 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | - | 1.330.000.000,00 | 1.601.300.000,00 | 1.915.510.000,00 | 2.291.957.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.307.080.430,00 | - |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota | | 1.330.000.000,00 | 1.601.300.000,00 | 1.915.510.000,00 | 2.291.957.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1.307.080.430,00 | - |
| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | 1.330.000.000,00 | 1.601.300.000,00 | 1.915.510.000,00 | 2.291.957.000,00 | | | | | | | | | | | | | 1.307.080.430,00 | - |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas yang dapat diukur dengan indikator makro Meningkatnya Angka Harapan Hidup.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran pokok sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan Kesehatan yang bermutu.
2. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai standar klasifikasi Rumah Sakit.
3. Meningkatnya fasilitas dan kemampuan aparatur.

- **Kekuatan (Strength)**

1. Adanya dukungan Stakeholder untuk pengembangan RS.
2. Melaksanakan program peningkatan pelayanan mutu kesehatan BLUD.
3. Adanya komitmen Manajemen dan kebersamaan karyawan terhadap kegiatan pengembangan pelayanan RS.
4. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan siap dalam pengembangan pelayanan RS.
5. Telah terakreditasinya 5 Pelayanan dasar RSUD Dokter Rubini Mempawah.
6. Lokasi RSUD Dokter Rubini Mempawah yang cukup strategis.
7. Meningkatkan akuntabilitas public kepada stakeholders.

- **Kelemahan (Weakness)**

1. Kurangnya ketersediaan lahan RS.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan.
3. Tingkat kemandirian yang masih membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait.
4. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan.
5. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama mendukung pengembangan pelayanan.
6. Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standar pelayanan RS menuju Type B
7. Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
8. Rumah Sakit belum memiliki pedoman reward dan punishment serta perencanaan SDM.

- **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya keinginan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.
- b. RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan satu-satunya Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Mempawah.
- c. Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen Rumah Sakit.
- d. Tersedianya SDM yang cukup potensial.

- **Tantangan (Theat)**

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat.
2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang baik yang semai kn tinggi.
3. Kenaikan harga listik dan BBM tiap tahun.
4. Masih tinggi jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Mempawah.

5. Kurangnya Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis.
6. Tingkat kehadiran Dokter Spesialis yang masih kurang dikarenakan mereka berdomisili diluar Kota Mempawah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD yaitu :

1. Kurangnya ketersediaan lahan RS.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan kesehatan.
3. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung ke arah pengembangan.
4. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan.
5. Jumlah dana masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
6. Kebijakan pemda dalam implementasi BLUD belum terealisasi.
7. Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Mempawah.
8. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam RPJPD diungkapkan bahwa visi pembangunan

jangka panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah “Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing”. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005–2025, yaitu **Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan.**

Selain berpedoman terhadap visi RPJPD Kabupaten Mempawah, perumusan visi RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan kecerdasan masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pimpinan Daerah juga fokus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang terdepan dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju

kondisi yang diinginkan, Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dalam arti mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan ancaman.

Selain itu perubahan tersebut berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (out come). Berpedoman pada Misi Kabupaten Mempawah tersebut maka tujuan (goal) yang ingin dicapai oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas.

RSUD Dokter Rubini Mempawah menyadari bahwa keberadaannya saat ini belum bisa memenuhi keinginan masyarakat. Maka dengan ini visi RSUD Dokter Rubini Mempawah diharapkan bisa sebagai tolok ukur untuk mencapai keinginan masyarakat yaitu dengan pelayanan yang bermutu artinya :

- Sesuai dengan kemampuan pasien.
- Sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah sakit.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan kebutuhan, tuntutan dan harapan pasien.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- Layanan Rumah Sakit tertib, teratur, adil dan tidak membedakan status masyarakat.
- Layanan Rumah Sakit menerapkan etika dan standar profesi.

3.2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan

yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholders. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Untuk mencapai VISI Kabupaten Mempawah seperti tersebut di atas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien**
- 2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.**
- 3. Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**
- 4. Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa**
- 5. Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pariwisata , Pelabuhan Internasional dan Industri**

Misi Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien, yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Mempercepat proses hilirisasi dan transformasi ekonomi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan..

Misi Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok untuk menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumberdaya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

Misi Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan sektor

unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada yang merupakan ciri khas daerah setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang langsung berhubungan dengan Misi RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai berikut :

- 1. Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu Bagi Masyarakat.**

Misi I

Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.

| TUJUAN | | SASARAN STRATEGIS | |
|------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi | 1 | Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi. |
| Indikator Sasaran Strategis | | Program/ Kegiatan / Penanggungjawab | |
| 1 | Nilai Sakip | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |

Misi II

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

| TUJUAN | | SASARAN STRATEGIS | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat. | 1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. |
| Indikator Sasaran Strategis | | Program/ Kegiatan / Penanggungjawab | |
| 1 | Angka Harapan Hidup | 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. |
| | | 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. |

3.2.1.3 Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan program terkait RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah sebagai berikut :

Misi II

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024.

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|----|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| | | | BOR = Bed Occupansy Rate= Jumlah hari perawatan rumah sakit | 55 | 60,00 | 60,63 | 63,67 | 66,85 |
| | | | ALOS = Average Length of Stay = Jumlah rata-rata lama dirawat | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari |
| | | | BTO = Bed Turn Over = Jumlah pemakaian tempat tidur | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali |
| | | | TOI = Turn Over Interval = Tempat tidur tidak ditempati | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |
| | | | GDR = Gross Death Rate = Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar | < 0,025 permill | < 0,025 permill | < 0,025 permill | < 0,025 permill | < 0,025 permill |
| | | | NDR = Net Death Rate = Jumlah angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar | < 0,045 permill | < 0,045 permill | < 0,045 permill | < 0,045 permill | < 0,045 permill |
| | | | Persentase Hasil Survey Indkes Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan IKM = Indeks Kesehatan Masyarakat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Sektor Kesehatan, Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Hal ini untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

RSUD Dokter Rubini Mempawah terletak di Jalan Dokter Rubini, yang merupakan Jalur Sutra Pantai Utara yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan beberapa Kabupaten/ Kota seperti Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak. Letak yang strategis dan dekat dengan ibukota Propinsi dengan jarak tempuh sekitar 95 km (1,5 jam) perjalanan. RSUD Dokter Rubini Mempawah tidak saja melayani masyarakat Kabupaten Mempawah tetapi juga sebagian masyarakat Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak dimana hampir 80-85% pasien menggunakan jaminan JAMKESMAS atau keluarga kurang mampu.

Ditinjau dari sisi lokasinya RSUD Dokter Rubini Mempawah telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 dimana pola ruangnya adalah fasitor umum berupa fasilitas kesehatan.

Sementara ditinjau dari Struktur Ruangnya, RSUD Dokter Rubini Mempawah terletak di pusat kegiatan wilayah (PKW) yang pelayanannya melayani kegiatan berskala provinsi atau beberapa kabupaten / kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan keadaan latar belakang didapatkan beberapa masalah yang mempengaruhi mutu, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan masyarakat/pasar khususnya pada kelas menengah keatas, potensi belum dapat dikemas secara optimal oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah karena RSUD Dokter Rubini Mempawah sudah mengimplementasikan Badan Layanan Umum Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Isu-isu Strategis Nasional yang ingin dicapai dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dari segi pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah ;

1. “Promotif Preventif Kesehatan untuk Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul menuju Indonesia Maju 2045”.
2. Penurunan Angka Stunting. Dalam hal penanganan stunting dan percepatan penurunan AKI AKB, kolaborasi antar lintas sektor sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% merupakan kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi sensitif”,
3. Kematian ibu dan bayi;
4. Perbaikan pengelolaan sistem JKN; Terkait pengelolaan sistem JKN, pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui pemberian bantuan iuran program JKN. Menurut Terawan, Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) mempunyai arti bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan

kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial.

5. Penguatan pelayanan kesehatan; serta isu terkait obat dan alat kesehatan”. Terkait obat dan alat kesehatan, diupayakan pengendalian harga obat dan mendorong alat kesehatan produk dalam negeri. Langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan adalah mendorong investasi, mempercepat lisensi wajib obat yang sangat dibutuhkan, membuka peluang investasi sebesar-besarnya dan deregulasi perizinan yang menghambat. Langkah-langkah percepatan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga obat dan alat kesehatan.
6. Ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun.
7. Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin yang menjadi dasar pemikiran pemerintah pusat berupa BPJS.
8. Masih belum optimalnya regulasi tentang BLUD dikalangan Pemerintah Daerah.
9. Tidak adanya penyediaan modal finansial untuk investasi pengembangan layanan eksklusif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yg ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan berikut ini:

1. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesatu, yaitu ***Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*** adalah:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua, yaitu ***Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat*** adalah:
 - a. Terwujudnya pendidikan gratis 12 tahun dan beasiswa bagi putra-putri daerah berprestasi ke perguruan tinggi.

- b. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis
3. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga, yaitu ***Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*** adalah:
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur public dan kualitas lingkungan hidup.
4. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat, yaitu ***Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa*** adalah:
Meningkatkan kemandirian desa sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat.
5. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima, yaitu ***Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*** adalah:
Mengembangkan investasi dan perdagangan daerah.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi Kabupaten Mempawah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana Visi Misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis

yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Untuk mendukung Tujuan yang di tetapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah RSUD Dokter Rubini Mempawah ingin memenuhi yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.

4.1.2. Sasaran

Sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kinerja Kabupaten Mempawah, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksananya.

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung peningkatan keamanan dan kualitas pelayanan publik.
3. Terwujudnya pendidikan gratis yang merata, serta beasiswa bagi putra-putri yang berprestasi dibidang pemuda dan olahraga.
4. Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis terwujud
5. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat miskin.
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik.
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
9. Meningkatnya Daya saing BUMDes.
10. Ekonomi kerakyatan disektor pertanian, peternakan, dan perikanan, kelautan meningkat.

11. Infrastruktur dan pemasaran di sektor pariwisata, budaya dan perdagangan dari lokal hingga nasional meningkat Kemiskinan desa menurun.

Sasaran Strategis Instansi Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

4.1.3. Indikator Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-past). Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Tabel 4 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Tahun 2024

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| MISI 1: Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien | | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | 80,00 – 85,00 |
| | Nilai SAKIP | A |
| MISI 2: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat | | |
| 1. Terwujudnya pendidikan gratis 12 tahun dan beasiswa bagi putra-putri daerah yang berprestasi ke perguruan tinggi | Indeks Pembangunan Manusia | 67,42 |
| 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis | Angka Kemiskinan (%) | 3,86 |
| | Stunting (%) | 1,0 |
| MISI 3: Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata | | |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur public dan kualitas lingkungan hidup | Indeks Infrastruktur (%) | 85,00 – 100,00 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%) | 72,00 – 73,50 |
| MISI 4: Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa | | |
| Meningkatkan kemandirian desa sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat | Indeks Desa Membangun | 0,6295 |
| | Jumlah Desa Mandiri | 37 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 7,11 - 7,61 |
| MISI 5: Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata | | |
| Mengembangkan investasi dan perdagangan daerah | Nilai Investasi PMDN/PMA (rupiah) | 2,00 – 2,5 Trilyun |
| | PDRB per Kapita (juta) | 25,286 |
| | Laju Inflasi (%) | 3,3 |
| | Tingkat Pengangguran (%) | 4,00 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.

Setiap sasaran strategis Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terkumpul sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Ikhtisar kebijakan pada masing-masing sasaran dan tujuan strategis untuk periode 2020 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Strategi I

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan juga memaksimalkan sarana prasarana Rumah Sakit dan mengoptimalkan informasi kesehatan Rumah Sakit.

Strategi II

Meningkatkan jangkauan dan pemerataan serta kualitas pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini sebagai berikut :

| Tabel 5.1 | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | | | | |
| RSUD dr. Rubini Mempawah | | | | |
| Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah | | | | |
| Visi | : Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas Mandiri dan Terdepan | | | |
| MISI I | : Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien | | | |
| | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Arah Kebijakan |
| | 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi | 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi | 1. Nilai Sakip | 1. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan publik |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | |
| | | | Pelayanan administrasi perkantoran | |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| | | | Peningkatan Disiplin Aparatur | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
| | | | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | |
| | | | Kerjasama Informasi dan Media Massa | |
| | | | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | |
| | | | Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | |
| | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | |
| MISI II | : Menciptakan Kualitas Kehidupan Masyarakat | | | |
| | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategi | Arah Kebijakan |
| | 1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat | 1. Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat | 1. Angka Harapan Hidup | 1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas |
| | | | | 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | |
| | | | Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | Perbaikan Gizi Masyarakat | |
| | | | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | |
| | | | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin | |
| | | | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata | |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata | |
| | | | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | |
| | | | Pengembangan SDM Kesehatan | |
| | | | Sistem Informasi Kesehatan | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | |
| | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada ditetapkan 17 (tujuh belas) program kerja berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat.
7. Kerjasama Informasi dan Media Massa.
8. Perbaikan Gizi Masyarakat.
9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin.
12. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata..
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.
14. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pengembangan SDM Kesehatan.
15. Sistem Informasi Kesehatan.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, maka RSUD Dokter Rubini Mempawah menentukan kegiatan yang akan dilakukan agar visi dan misi dapat dicapai.

Adapun kegiatan yang dicanangkan dalam RENSTRA RSUD Dokter Rubini Mempawah periode 2020 – 2024 berjumlah 57 (lima puluh tujuh) kegiatan diantaranya :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kebersihan.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/ pengamanan kantor
12. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan
13. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan Meubeler
16. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
17. Pengadaan Komputer
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
23. Pengadaan rumah dinas
24. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27. Penyusunan laporan keuangan semesteran
28. Penyusunan keuangan akhir tahun
29. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
30. Peningkatan pelayanan kesehatan
31. Promosi kesehatan rumah sakit
32. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
33. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
34. Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit
35. Pelayanan mobilitas rumah sakit
36. Penguburan pasien tidak mampu
37. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
38. Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit
39. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
40. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
41. Pengadaan Obat-obatan rumah sakit
42. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit
43. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
44. Pengadaan bahan laboratorium
45. Pengadaan bahan radiologi

46. Pengadaan Gas Medis
47. Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit
48. Pengadaan Alat-alat Kalibrasi
49. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan rumah sakit
50. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitari
51. Peningkatan Rekam Medis
52. Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas
53. Peningkatan Kinerja Pegawai dalam Pengembangan SDM Masyarakat
54. Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan
55. Penyusunan Dokumen Data SDM Kesehatan
56. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
57. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu pemutahiran Nama Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya.
- 1.3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 1.4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.4.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material.
- 1.4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.4.9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- 1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.5.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
- 1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 1.7.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.7.7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

- 1.8.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya.
- 2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
- 2.1.3 Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.4 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.5 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.
- 2.1.6 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin.
- 2.1.7 Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai.
- 2.1.8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

- 2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV.
- 2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- 2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
- 2.2.4 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
- 2.2.5 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

2.2.6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota.

2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

2.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3.1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota.

3.1.1 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berikut ditampilkan tabel yang memuat Program, Indikator Kinerja, Kegiatan dan Pagu Indikatif Satu Tahun Transisi yang menjelaskan arah pembangunan di RSUD Dokter Rubini

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|---|-------------------|-----------------|--|--|---|---|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| Tujuan 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | Sasaran 1 | | | Nilai SAKIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | 55.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA) | 4 Dokumen | 7 | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01 | Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | N/A | | - | 60 | 57.468.929.205,00 | 65 | 60.615.038.165,00 | 70 | 67.004.376.574,00 | 75 | 68.298.601.177,00 | 75 | 68.298.601.177,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah | N/A | | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | N/A | | | 0 | | 0 | | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja | N/A | | - | 80 | 50.500.000,00 | 85 | 61.000.000,00 | 90 | 66.500.000,00 | 95 | 78.500.000,00 | 100 | 78.500.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | N/A | | | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | N/A | | | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | N/A | | | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | 2 | 5.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | N/A | | | 1 | 5.500.000,00 | 1 | 6.000.000,00 | 1 | 6.500.000,00 | 1 | 8.500.000,00 | 1 | 8.500.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | N/A | | | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | 1 | 5.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | N/A | | | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 35.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|------------|-------------------|-----------------|--|--|---|---|--------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|--------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 2 | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran | 1 Dokumen | 1 | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 1 | 20.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan | Jumlah gaji dan tunjangan | | | 26.015.430.565,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 75 | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Peningkatan manajemen aset / barang daerah | Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/ barang daerah | 1 Dokumen | 75 | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran administrasi keuangan | N/A | | | 85 | 27.372.702.005,00 | 90 | 28.750.162.105,00 | 95 | 31.490.062.211,00 | 95 | 31.995.867.846,00 | 100 | 31.995.867.846,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | N/A | | | 370 | 27.316.202.005,00 | 445 | 28.682.012.105,00 | 450 | 31.366.112.711,00 | 430 | 31.871.918.346,00 | 430 | 31.871.918.346,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan penggajian / verifikasi keuangan SKPD | N/A | | | 2 | 16.500.000,00 | 2 | 18.150.000,00 | 2 | 63.949.500,00 | 2 | 63.949.500,00 | 2 | 63.949.500,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | N/A | | | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 35.000.000,00 | 1 | 35.000.000,00 | 1 | 35.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.02.07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD | N/A | | | 1 | 15.000.000,00 | 1 | 20.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur | | | | | 180.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas | 351 Stel | 360 stel | 180.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manjerial Aparatur | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Biotek, pelatihan dll) | 1 Tahun | 8 orang | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi kepegawaian | N/A | | | 80 | 336.000.000,00 | 85 | 385.200.000,00 | 90 | 462.240.000,00 | 95 | 554.688.000,00 | 100 | 554.688.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | N/A | | | 1 | 216.000.000,00 | 1 | 241.200.000,00 | 1 | 289.440.000,00 | 1 | 347.328.000,00 | 1 | 347.328.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.05.10 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | N/A | | | 12 | 120.000.000,00 | 14 | 144.000.000,00 | 17 | 172.800.000,00 | 20 | 207.360.000,00 | 25 | 207.360.000,00 | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|------------|-------------------|-----------------|---|--|---|---|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--|------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 2.000.500.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah materi | 518 Lembar | 700 lembar | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Tenaga kebersihan kantor | 100% | 100% | 1.650.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah paket alat tulis kantor | 18 Jenis | 80% | 20.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | Cetak 7 jens, 42.000 lembar | 80% | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan | 25 Jenis | 80% | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan | - | 80% | 2.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah paket makanan dan minuman | 1350 Kotak | 80% | 65.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah dokumen laporan rekomendasi hasil rapat dan konsultasi ke luar daerah | 1 Tahun | 80% | 65.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan | Jumlah paket alat dan Bahan pembersih | 100% | 80% | 120.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah | Meningkatkannya arsip dinamis in aktif | | | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah | Terdapatnya jumlah arsip Dinamis in Aktif di RSUD dr. Rubini | - | 75% | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat | | | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik | Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik | 100% | 100% | 25.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | N/A | | 85 | 465.827.200,00 | 90 | 546.596.060,00 | 95 | 641.826.363,00 | 100 | 754.938.531,00 | 100 | 754.938.531,00 | | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 55.000.000,00 | 1 | 61.000.000,00 | 1 | 67.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 75.000.000,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 25.600.000,00 | 1 | 29.320.000,00 | 1 | 32.184.000,00 | 1 | 36.220.800,00 | 1 | 36.220.800,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | N/A | | 1 | 156.000.000,00 | 1 | 202.800.000,00 | 1 | 263.640.000,00 | 1 | 342.732.000,00 | 1 | 342.732.000,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket logistik kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 71.500.000,00 | 1 | 78.650.000,00 | 1 | 86.515.000,00 | 1 | 95.166.500,00 | 1 | 95.166.500,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | N/A | | 1 | 27.500.000,00 | 1 | 30.250.000,00 | 1 | 33.275.000,00 | 1 | 36.602.500,00 | 1 | 36.602.500,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | N/A | | 1 | 2.750.000,00 | 1 | 3.100.000,00 | 1 | 3.400.000,00 | 1 | 3.700.000,00 | 1 | 3.700.000,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.07 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material | Jumlah paket bahan material yang disediakan | N/A | | 1 | 27.500.000,00 | 1 | 30.250.000,00 | 1 | 33.275.000,00 | 1 | 36.602.500,00 | 1 | 36.602.500,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | N/A | | 1 | 75.000.000,00 | 1 | 85.000.000,00 | 1 | 95.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | | | | |
| | | 1.02.01.2.06.10 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | N/A | | 1 | 24.977.200,00 | 1 | 26.226.060,00 | 1 | 27.537.363,00 | 1 | 28.914.231,00 | 1 | 28.914.231,00 | | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|------------|-------------------|-----------------|---|--|---|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpebuhnya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 3.069.000.000 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan | 4 Unit | 7 unit | 2.100.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah paket perlengkapan gedung kantor | - | 9 unit | 225.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan meubeler | Jumlah paket meubeler | 7 Unit | 80% | 200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi | Jumlah alat studio dan komunikasi | 3 Jenis | 80% | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Komputer | Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan | 7 Unit | 10 unit | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengadaan Rumah Dinas | Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership | 1 Tahun | 4 unit | 80.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan sarana dan prasarana | N/A | | | 80 | 1.752.600.000,00 | 85 | 1.681.050.000,00 | 90 | 3.813.835.000,00 | 95 | 3.026.696.500,00 | 100 | 3.026.696.500,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | 1.02.01.2.07.01 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | N/A | | | 2 | 660.000.000,00 | 9 | 225.000.000,00 | 5 | 2.178.000.000,00 | 3 | 1.197.900.000,00 | 0 | 1.197.900.000,00 | | |
| | | 1.02.01.2.07.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | N/A | | | 1 | 450.000.000,00 | 1 | 465.850.000,00 | 1 | 512.435.000,00 | 1 | 563.678.500,00 | 1 | 563.678.500,00 | | |
| | | 1.02.01.2.07.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | N/A | | | 1 | 220.000.000,00 | 1 | 242.000.000,00 | 1 | 266.200.000,00 | 1 | 292.820.000,00 | 1 | 292.820.000,00 | | |
| | | 1.02.01.2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | N/A | | | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 121.000.000,00 | 1 | 133.100.000,00 | 1 | 146.410.000,00 | 1 | 146.410.000,00 | | |
| | | 1.02.01.2.07.10 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan | N/A | | | 1 | 24.600.000,00 | 12 | 315.200.000,00 | 15 | 388.100.000,00 | 18 | 465.888.000,00 | 18 | 465.888.000,00 | | |
| | | 1.02.01.2.07.11 | Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | N/A | | | 1 | 288.000.000,00 | 1 | 312.000.000,00 | 2 | 336.000.000,00 | 2 | 360.000.000,00 | 2 | 360.000.000,00 | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 1.048.000.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik | 3 Dokumen | 36 dok | 1.000.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban pengamanan kantor | Jumlah petugas keamanan kantor | 4 Orang | 4 orang | 48.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|------------|-------------------|-----------------|---|--|---|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|--|------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang | N/A | | | 85 | 1.255.300.000,00 | 90 | 1.501.080.000,00 | 95 | 1.675.388.000,00 | 100 | 1.847.876.800,00 | 100 | 1.847.876.800,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | N/A | | | 1 | 2.500.000,00 | 1 | 3.000.000,00 | 1 | 3.500.000,00 | 1 | 4.000.000,00 | 1 | 4.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | N/A | | | 3 dokumen | 1.200.000.000,00 | 3 dokumen | 1.440.000.000,00 | 3 dokumen | 1.608.000.000,00 | 3 dokumen | 1.773.600.000,00 | 3 dokumen | 1.773.600.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | N/A | | | 1 laporan | 52.800.000,00 | 1 laporan | 58.080.000,00 | 1 laporan | 63.888.000,00 | 1 laporan | 70.276.800,00 | 1 laporan | 70.276.800,00 | | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpebihnya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 795.000.000,00 | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang terpelihara | 1 Tahun | 80% | 250.000.000,00 | 85% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Jumlah mobil jabatan yang terpelihara | 1 Tahun | 80% | 25.000.000,00 | 85% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 1 Tahun | 26 unit | 200.000.000,00 | 42 unit | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 1 Tahun | 80% | 300.000.000,00 | 85% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer | Jumlah unit komputer yang terpelihara | 1 Tahun | 80% | 20.000.000,00 | 85% | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana | N/A | | | 85 | 1.236.000.000,00 | 90 | 1.439.950.000,00 | 95 | 1.679.525.000,00 | 100 | 1.965.033.500,00 | 100 | 1.965.033.500,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.01.2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | N/A | | | 1 | 27.500.000,00 | 1 | 31.000.000,00 | 1 | 35.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan | N/A | | | 42 | 256.500.000,00 | 44 | 306.150.000,00 | 49 | 365.565.000,00 | 57 | 436.681.500,00 | 57 | 436.681.500,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.05 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara | N/A | | | 1 | 30.000.000,00 | 1 | 40.000.000,00 | 1 | 45.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 50.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | N/A | | | 1 | 24.000.000,00 | 1 | 28.800.000,00 | 1 | 34.560.000,00 | 1 | 41.472.000,00 | 1 | 41.472.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | N/A | | | 1 | 250.000.000,00 | 1 | 290.000.000,00 | 1 | 345.000.000,00 | 1 | 414.800.000,00 | 1 | 414.800.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | N/A | | | 1 | 288.000.000,00 | 1 | 312.000.000,00 | 2 | 336.000.000,00 | 2 | 360.000.000,00 | 2 | 360.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.01.2.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | N/A | | | 1 | 360.000.000,00 | 1 | 432.000.000,00 | 2 | 518.400.000,00 | 2 | 622.080.000,00 | 2 | 622.080.000,00 | | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD | | | | | 20.000.000.000,00 | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan | Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit | 1 Tahun | 100% | 20.000.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan | N/A | 60 | 59.330.472.000,00 | 70 | 62.513.266.000,00 | 75 | 74.652.717.180,00 | 78 | 87.226.233.491,00 | 78 | 87.226.233.491,00 | 78 | 87.226.233.491,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.02.2.01 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Perorangan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan | N/A | 100 | 29.872.000.000,00 | 100 | 27.446.400.000,00 | 100 | 32.935.680.000,00 | 100 | 37.522.816.000,00 | 100 | 37.522.816.000,00 | 100 | 37.522.816.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.02.2.01.03 | Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun | N/A | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 1.02.02.2.01.08 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit | N/A | 1 | 7.000.000.000,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 1.02.02.2.01.13 | Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | N/A | 1 | 228.000.000,00 | 1 | 273.600.000,00 | 1 | 328.320.000,00 | 1 | 393.984.000,00 | 1 | 393.984.000,00 | 1 | 393.984.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.14 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Peranjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | N/A | 1 | 2.400.000.000,00 | 1 | 2.880.000.000,00 | 1 | 3.456.000.000,00 | 1 | 4.147.200.000,00 | 1 | 4.147.200.000,00 | 1 | 4.147.200.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.15 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance ceter | N/A | 1 | 96.000.000,00 | 1 | 115.200.000,00 | 1 | 138.240.000,00 | 1 | 165.888.000,00 | 1 | 165.888.000,00 | 1 | 165.888.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.16 | Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah obat dan vaksin yang disediakan | N/A | 14 | 14.400.000.000,00 | 17 | 17.280.000.000,00 | 20 | 20.736.000.000,00 | 24 | 24.883.200.000,00 | 50 | 24.883.200.000,00 | 50 | 24.883.200.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.17 | Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah bahan habis pakai yang disediakan | N/A | 1 | 5.100.000.000,00 | 1 | 6.120.000.000,00 | 1 | 7.344.000.000,00 | 1 | 6.812.800.000,00 | 1 | 6.812.800.000,00 | 1 | 6.812.800.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.18 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan | N/A | 1 | 168.000.000,00 | 1 | 201.600.000,00 | 1 | 241.920.000,00 | 1 | 290.304.000,00 | 1 | 290.304.000,00 | 1 | 290.304.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.01.20 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Peranjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | N/A | 2 | 480.000.000,00 | 2 | 576.000.000,00 | 2 | 691.200.000,00 | 2 | 829.440.000,00 | 2 | 829.440.000,00 | 2 | 829.440.000,00 | | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | | | 21.469.775.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target - Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit - Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat - Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur | 100% | 75% | 21.369.775.000,00 | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | | | 66 | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 hari | < 5 hari | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 40 kali | 50 kali | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|------------|-------------------|------|---|---|---|---|-----------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|--|------|--|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | | - Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati - Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keuar. - Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keuar. | 3 hari | 3 hari | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10/permill | < 0,045 permill | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25/permill | <0,025 permill | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah promosi kesehatan rumah sakit | - | 80% | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat | | | 60.000.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya | Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit | 100% | 100% | 60.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | 86.072.500,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat | 100% | 1 Tahun | 86.072.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | 420.000.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan | Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi | 100% | 75% | 420.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan | | | 795.625.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit | Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum | 100% | 100% | 780.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penguburan Pasien Tidak Mampu | Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar | 100% | 100% | 15.625.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Sistem Informasi Kesehatan | Meningkatnya sistem informasi kesehatan | | | 250.000.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Peningkatan Rekam Medis | Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis | 1 Tahun | 100% | 250.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit | Jumlah dokumen BLUD | 1 Tahun | 80% | 100.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | |
|------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|-----|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.02.2.02 | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan | N/A | | | 100 | 28.413.472.000,00 | 100 | 33.893.366.000,00 | 100 | 40.421.187.180,00 | 100 | 48.290.982.491,00 | 100 | 48.290.982.491,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.02.2.02.12 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | N/A | | | 5 | 103.287.000,00 | 5 | 123.944.000,00 | 5 | 148.733.280,00 | 5 | 178.479.936,00 | 5 | 178.479.936,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.15 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | N/A | | | 1 | 72.000.000,00 | 1 | 86.400.000,00 | 1 | 103.680.000,00 | 1 | 124.416.000,00 | 1 | 124.416.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.18 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan | N/A | | | 1 | 150.000.000,00 | 1 | 165.000.000,00 | 1 | 185.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | 1 | 200.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.32 | Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit | N/A | | | 2 | 26.549.185.000,00 | 2 | 31.859.022.000,00 | 2 | 38.230.826.400,00 | 2 | 45.879.991.680,00 | 2 | 45.879.991.680,00 | | | |
| | | | | - Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit | | | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | | | |
| | | | | - Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat | | | | < 5 hari | | < 5 hari | | < 5 hari | | < 5 hari | | < 5 hari | | | | |
| | | | | - Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur | | | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | | | |
| | | | | - Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati | | | | 3 hari | | 3 hari | | 3 hari | | 3 hari | | 3 hari | | | | |
| | | | | - Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. | | | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | | | |
| | | | | - Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. | | | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | <0,025 permill | | | | |
| | | 1.02.02.2.02.34 | Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | N/A | | | 2 | 819.000.000,00 | 2 | 859.000.000,00 | 2 | 902.947.500,00 | 2 | 948.094.875,00 | 2 | 948.094.875,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.02.35 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota | N/A | | | 1 | 720.000.000,00 | 1 | 800.000.000,00 | 1 | 850.000.000,00 | 1 | 960.000.000,00 | 1 | 960.000.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.03 | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan | N/A | | | 100 | 275.000.000,00 | 100 | 302.500.000,00 | 100 | 332.750.000,00 | 100 | 366.025.000,00 | 100 | 366.025.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.02.2.03.02 | Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan | N/A | | | 1 | 275.000.000,00 | 1 | 302.500.000,00 | 1 | 332.750.000,00 | 1 | 366.025.000,00 | 1 | 366.025.000,00 | | | |
| | | 1.02.02.2.04 | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan | N/A | | | 85 | 770.000.000,00 | 90 | 871.000.000,00 | 95 | 963.100.000,00 | 95 | 1.046.410.000,00 | 100 | 1.046.410.000,00 | RSUD | Kabupaten Mempawah | |
| | | 1.02.02.2.04.02 | Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar | N/A | | | 1 | 770.000.000,00 | 1 | 871.000.000,00 | 1 | 963.100.000,00 | 1 | 1.046.410.000,00 | 1 | 1.046.410.000,00 | | | |

| Tujuan OPD | Sasaran Strategis | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi | | |
|------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|--|------------------|--|--------|------|--------------------|
| | | | | | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024) | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | | |
| | | | Permendagri 13 Tahun 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Pengembangan SDM Kesehatan | Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan | | | 1.120.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | | Kegiatan Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan | Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti | 1 Tahun | 80% | 1.000.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Bimbingan teknis tenaga kesehatan | Jumlah Bimtek In House training | - | 80% | 70.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan | Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan | - | 4 | 50.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Permendagri 90 Tahun 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar | N/A | | | 70 | 1.330.000.000,00 | 75 | 4.820.000,00 | 80 | 1.915.510.000,00 | 85 | 2.291.957.000,00 | 85 | 2.291.957.000,00 | | | RSUD | Kabupaten Mempawah |
| | | 1.02.03.2.02 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Mamasii Di Wilayah Kabupaten / Kota | Persentase pemenuhan SDM kesehatan | N/A | | | 80 | 1.330.000.000,00 | 85 | 4.820.000,00 | 90 | 1.915.510.000,00 | 95 | 2.291.957.000,00 | 95 | 2.291.957.000,00 | | | | |
| | | 1.02.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) | N/A | | | 200 | 1.330.000.000,00 | 623 | 4.820.000,00 | 200 | 1.915.510.000,00 | 250 | 2.291.957.000,00 | 158 | 2.291.957.000,00 | | | | |

6.3 Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai Misi 1, yaitu Menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional dan efisien dengan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan penerapan informasi birokrasi dengan indikator sasaran strategis nilai sakin pada Tahun 2021 dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.1
Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

| Program | | Anggaran Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2020 | Capaian (%) |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Permendagri 13 | | | | |
| 1. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur | 40.000.000,00 | - | - |
| 2. | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | 28.280.582.860,00 | 27.035.670.020,00 | 95,60 |
| | Jumlah | 28.320.582.860,00 | 27.035.670.020,00 | 95,46 |
| Program | | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian (%) |
| Permendagri 90 | | | | |
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 28.320.582.860,00 | 27.035.670.020,00 | 95,46 |
| | Jumlah | 28.320.582.860,00 | 27.035.670.020,00 | 95,46 |

Untuk mencapai mencapai Misi 2, yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran strategis angka harapan hidup demi melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2021 dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.2

Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

| Program | | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian (%) |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Permendagri 13 | | | | |
| 1. | Upaya Kesehatan Masyarakat | 22.237.806.700,00 | 19.980.975.523,00 | 89,85 |
| 2. | Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 49.102.000.481,00 | 36.717.666.904,00 | 74,78 |
| 3. | Pengembangan SDM Kesehatan | 4.820.000.000.,00 | 2.419.285.708,00 | 50,19 |
| 4. | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata | 21.649.639.925,00 | 21.392.614.617,00 | 98,81 |
| Jumlah | | 25.057.981.295,00 | 24.345.190.787,00 | 97,16 |
| Program | | Anggaran Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Capaian (%) |
| Permendagri 90 | | | | |
| 1. | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 24.986.264.700,00 | 24.273.474.192,00 | 97,15 |
| 2. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 71.716.595,00 | 71.716.595,00 | 100 |
| Jumlah | | 25.057.981.295,00 | 24.345.190.787,00 | 97,16 |

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas , selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Belanja

| Realisasi <i>Tahun 2019 (Rp)</i> | Anggaran Setelah Perubahan <i>Tahun 2020 (Rp)</i> | Realisasi Setelah Perubahan <i>Tahun 2020 (Rp)</i> |
|--|---|--|
| 76.546.242.197,00 | 81.616.100.339,00 | 77.654.849.882,00 |

Realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 77.654.849.882,00 atau sebesar 95,15 % dari anggaran setelah perubahan dalam APBD sebesar Rp. 81.616.100.339,00. Sedangkan apabila realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 76.546.242.197,00 atau sebesar 96,36 %. Hal ini menunjukkan kenaikan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV bulan Desember TA. 2020 sebesar Rp. 1.108.607.685,00.

Rincian belanja tahun 2021 sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Permendagri 13

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 1
Belanja Tidak Langsung Tahun 2021

| Anggaran Tahun 2020 (Rp) | Realisasi Tahun 2020 (Rp) | % |
|---|--|----------|
| - | - | - |

2) Belanja Langsung

Tabel 2
Jenis Belanja Tahun 2021

| Jenis Belanja | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| Belanja Pegawai | 13.970.728.128,00 | 10.011.016.459,00 | 71,66 |
| Jenis Belanja | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % |
| Belanja Barang dan Jasa | 22.897.939.753,00 | 20.016.601.126,00 | - |
| Belanja Modal | 1.335.832.600,00 | 1.295.761.329,00 | - |
| Jumlah | 24.233.772.353,00 | 21.312.362.455,00 | - |

Realisasi Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2020 mencapai Rp. 21.312.362.455,00 dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.24.233.772.353,00. Hal tersebut dikarenakan adanya biaya-biaya pada DPA/DPPA yang belum terealisasi seluruhnya.

3. Pendapatan

Tabel. 3
Pendapatan BLUD Tahun 2021

| Jenis Pendapatan | Target 2021 | Realisasi 2021 | % |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Pelayanan BLUD | 25.000.000.000,00 | 46.957.470.219,80 | 187,83 |
| Jumlah | 25.000.000.000,00 | 46.957.470.219,80 | 187,83 |

Target Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. **46.957.470.219,80** atau 187,83%. Dibandingkan pada Tahun 2020 Realisasi Pendapatan BLUD sebesar **Rp. 31.959.587.641,00** atau 159,80%. Hal ini terdapat kenaikan sebesar Rp.14.997.882.578,80.

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran yang tersedia pada RSUD dr. Rubini Mempawah serta realisasi, sebagaimana tersebut dibawah ini, berdasarkan Permendagri No 90 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jenis Belanja Operasi dan Modal

| Jenis Belanja | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | % |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Belanja Operasi | 91.469.654.162,00 | 74.361.455.922,00 | 81,30% |
| Belanja Modal | 12.736.332.600,00 | 11.726.660.140,00 | 92,07% |
| Jumlah | 104.205.986.762,00 | 86.088.116.062,00 | 82,61% |

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2021 mencapai Rp.86.088.116.062,00 atau sebesar 82,61% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.104.205.986.762,00 atau 82,61%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp.74.361.455.922,00 atau 81,30% dari anggaran sebesar Rp.91.469.654.162,00. Dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp.11.726.660.140,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp.12.736.332.600,00.

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Analisis Anggaran dan realisasi belanja yang tersedia pada RSUD dr. Rubini Mempawah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.2
Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

| Jenis Belanja | Anggaran 2021 Rp | Realisasi 2021 Rp | Sisa Rp | % |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Belanja Operasi | 91.469.654.162,00 | 74.361.455.922,00 | 17.108.198.240,00 | 81,30% |
| Belanja Modal | 12.736.332.600,00 | 11.726.660.140,00 | 1.009.672.460,00 | 92,07% |
| Jumlah | 104.205.986.762,00 | 86.088.116.062,00 | 18.117.870.700 | 82,61% |

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2021 mencapai Rp.86.088.116.062,00 atau sebesar 82,61% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.104.205.986.762,00 atau 82,61% dengan sisa anggaran sebesar Rp.18.117.870.700,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp.74.361.455.922,00 atau 81,30% dari anggaran sebesar Rp.91.469.654.162,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.17.108.198.240,00.

Dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp.11.726.660.140,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp.12.736.332.600,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.009.672.460,00.

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah. Terkait hal tersebut diatas RSUD Dokter Rubini Mempawah menetapkan indikator dalam pencapaian tujuan serta sasaran dari RPJMD tersebut. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan RSUD Dokter Rubini Mempawah dengan adalah sebagai berikut :

1. Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit
2. Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur
3. Average Length of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat
4. Turn Over Internal (TOI) = Tempat tidur tidak ditempati
5. Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar
6. Net Death Rate (NDR) = Jumlah angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar
7. Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan jasa kesehatan
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Program dan Kegiatan yang ada di RSUD Dokter Rubini Mempawah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah yang mengacu RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 dalam kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

| Tabel 7.1 | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran | | | | | | | | |
| RSUD dr. Rubini Mempawah | | | | | | | | |
| Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah | | | | | | | | |
| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | | |
| a | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| b | Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA) | 4 Dokumen | 7 Dokumen | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 1. | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | N/A | | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 1.1 | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah | N/A | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| a | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | N/A | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja | N/A | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| a | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| c | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| d | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| e | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | | |
| a | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| b | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| c | Jumlah gaji dan tunjangan | | | | | | | |
| d | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 75% | | | | | |
| d | Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah | 1 Dokumen | 75% | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 2 | Persentase pelayanan administrais keuangan | N/A | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | N/A | | 370 | 445 | 450 | 430 | 430 |
| b | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| c | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | | | | | | |
| a | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| b | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | |
| c | Jumlah gaji dan tunjangan | | | | | | | |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | |
| d | Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah | 100% | 75% | | | | | |
| | | 1 Dokumen | 75% | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 2 | Persentase pelayanan administrais keuangan | N/A | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| a | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | N/A | 370 | 445 | 450 | 430 | 430 | |
| b | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| c | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| d | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Disiplin Aparatur | | | | | | | |
| a | Jumlah paket pakaian dinas | 351 Stel | 337 Stel | | | | | |
| Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur | | | | | | | | |
| a | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll) | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 3 | Persentase layanan administrasi kepegawaian | N/A | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| a | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| b | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | N/A | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 4 | Tercapaiannya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| a | Jumlah materai | 518 Lembar | 518 Lembar | | | | | |
| b | Jumlah Tenaga kebersihan kantor | 100% | 100% | | | | | |
| c | Jumlah paket alat tulis kantor | 18 Jenis | 18 Jenis | | | | | |
| d | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | Cetak 7 jens, 42.000 lembar | Cetak 7 jens, 46.102 lembar | | | | | |
| e | Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan | 25 Jenis | 25 Jenis | | | | | |
| f | Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan | - | - | | | | | |
| g | Jumlah paket makanan dan minuman | 1350 Kotak | 1350 Kotak | | | | | |
| h | Jumlah dokumen laporan rekomendasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| i | Jumlah paket alat dan Bahan pembersih | 100% | 100% | | | | | |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Meningkatnya arsip dinamis in aktif | | | | | | | |
| j | Terdatanya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini | - | 75% | | | | | |
| | Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat | | | | | | | |
| k | Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik | 100% | 100% | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
| 4 | Persentase Pelayanan Administrasi Umum | N/A | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a | Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah paket logistik kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| e | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| g | Jumlah paket bahan material yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| h | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| i | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | |
| 5 | Terpeenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | |
| a | Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan | 4 Unit | 1 Unit | | | | | |
| | | - | - | | | | | |
| b | Jumlah paket perlengkapan gedung kantor | 7 Unit | 15 Unit | | | | | |
| c | Jumlah paket meubeler | 7 Unit | 10 Unit | | | | | |
| d | Jumlah alat studio dan komunikasi | 3 Jenis | - | | | | | |
| e | Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan | 7 Unit | 8 unit | | | | | |
| f | Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
| 5 | Persentase peningkatan sarana dan prasarana | N/A | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| a | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | N/A | | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| b | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Jumlah paket mebel yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| e | Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan | N/A | | 1 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| f | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | |
| 6 | Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | |
| a | Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | | | | |
| b | Jumlah petugas keamanan kantor | 4 Orang | 4 Orang | | | | | |
| | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | |
| 6 | Persentase penyediaan jasa penunjang | N/A | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b | Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | N/A | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| c | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 7 | Terpenuhiya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | |
| a | Jumlah Gedung kantor yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| b | Jumlah mobil jabatan yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| c | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| d | Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| e | Jumlah unit komputer yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 7 | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana | N/A | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| a | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b | Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| e | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | N/A | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| f | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | N/A | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| g | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | N/A | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 8 | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD | | | | | | | |
| a | Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 8 | Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | N/A | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 9 | Persentase Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | | | | | | | |
| a | Jumlah Bangunan Poli Klinik Rumah Sakit | - | - | | | | | |
| b | Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang layak pakai | 100% | 100% | | | | | |
| c | Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang standar | 100% | 100% | | | | | |
| d | Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai medis Rumah Sakit | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| e | Jumlah kendaraan ambulance / mobil jenazah | - | - | | | | | |
| f | Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit | - | - | | | | | |
| g | Jumlah makan dan minum pasien yang disediakan | - | - | | | | | |
| h | Jumlah bahan-bahan laboratorium rumah sakit | - | - | | | | | |
| i | Jumlah bahan radiologi | - | - | | | | | |
| j | Jumlah kebutuhan gas medis di rumah sakit | - | - | | | | | |
| k | Jumlah perlengkapan rumah sakit sesuai standar | 100% | 100% | | | | | |
| l | Jumlah kalibrasi rumah sakit | - | - | | | | | |
| Persentase pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana | | | | | | | | |
| m | Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| n | Jumlah sarana air bersih dan sanitari yang terpelihara | - | - | | | | | |
| Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan | | | | | | | | |
| o | Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit | - | - | | | | | |
| p | Jumlah workshoop manajemen rumah sakit | 100% | - | | | | | |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 9 | Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan | N/A | | 60 | 70 | 75 | 78 | 78 |
| a | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun | N/A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit | N/A | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| e | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintenance ceter | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f | Jumlah obat dan vaksin yang disediakan | N/A | | 14 | 17 | 20 | 24 | 25 |
| g | Jumlah bahan habis pakai yang disediakan | N/A | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| h | Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| i | Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat | | | | | | | |
| a | Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target | 100% | | | | | | |
| | - Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit | 66 | 60 | | | | | |
| | - Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat | 3 hari | 6 hari | | | | | |
| | - Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur | 40 kali | 40-50 kali | | | | | |
| | - Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati | 3 hari | 1-33 hari | | | | | |
| | - Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. | 10/permill | <45 permill | | | | | |
| | - Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. | 25/permill | <25 permill | | | | | |
| b | Jumlah promosi kesehatan rumah sakit | - | - | | | | | |
| Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | |
| c | Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit | 100% | 100% | | | | | |
| Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | |
| d | Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat | 100% | 100% | | | | | |
| Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | |
| e | Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi | 100% | 100% | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | |
| f | Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum | 100% | 100% | | | | | |
| g | Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar | 100% | 100% | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 10 | Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan | N/A | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar' | N/A | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit | N/A | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | - Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit | | | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| | - Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat | | | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari | < 5 hari |
| | - Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur | | | 40-50 kali | 40-50 kali | 40-50 kali | 40-50 kali | 40-50 kali |
| | - Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati | | | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |
| | - Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. | | | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 | < 0,045 |
| | - Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. | | | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| e | Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | N/A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| f | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 11 | Meningkatnya sistem informasi kesehatan | | | | | | | |
| a | Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 11 | Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan | N/A | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| a | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 12 | Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | |
| a | Jumlah dokumen BLUD | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 12 | Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan | N/A | | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| a | Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar | N/A | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 | | | | | | | | |
| 13 | Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan | | | | | | | |
| a | Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | |
| b | Jumlah Bimtek In House training | - | | | | | | |
| c | Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan | - | | | | | | |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | |
| 13 | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar | N/A | | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| | Persentase pemenuhan SDM kesehatan | N/A | | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| a | Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes) | N/A | | 200 | 623 | 200 | 250 | 158 |

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini adalah merupakan penjabaran RPJMD RSUD Dokter Rubini Mempawah, mengacu pada RPJMD Kabupaten Mempawah 2020 - 2024 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit. Renstra ini akan berfungsi sebagai perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan *action plan* (rencana tindak) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit setiap tahunnya. Selain itu, Renstra ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung administratif penetapan PPK-BLUD di rumah sakit yang telah di implementasikan.

RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD Dokter Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

Dengan dirumuskannya Renstra ini, diharapkan rumah sakit dapat mempersiapkan diri dalam mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra akan menjaga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi serta menjaga harmonisasi. Renstra RSUD Dokter Rubini tahun 2020 - 2024 ini merupakan rencana pengembangan bisnis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja lima tahunan yang dituangkan dalam suatu visi, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Berkualitas”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan/sasaran, strategi dan program serta kegiatan-kegiatan.

Penetapan sasaran, strategi, program dan kegiatan diharapkan dapat membantu Rumah Sakit dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Seluruh tujuan/sasaran yang telah ditetapkan tersebut akan dapat dicapai apabila asumsi-asumsi yang dirumuskan terpenuhi. Apabila terjadi pergeseran dari asumsi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal kembali untuk merumuskan sasaran, program dan target yang akan dicapai, sehingga sasaran yang ditetapkan menjadi logis dan deviasinya tidak terlalu jauh.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 - 2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Demikian Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 - 2024 telah disusun, sebagai panduan bagi RSUD Dokter Rubini Mempawah dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD dr. Rubini Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024;
2. Seluruh komponen pada RSUD dr. Rubini Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD dr. Rubini Mempawah selama periode Renstra.
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD dr. Rubini Mempawah, Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang ;
6. Rencana Strategi RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD dr. Rubini Mempawah untuk 5 tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Dengan demikian maka Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Dokter Rubini Mempawah.

Penyusunan Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja SKPD. Mudah-mudahan Rencana Strategi Tahun 2020-2024 ini dapat mengantarkan RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Mempawah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Mempawah, sehingga dapat mendukung Visi Kabupaten Mempawah yaitu : ***”Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan”***

Mempawah, 2022

Direktur RSUD Dokter Rubini Mempawah



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tk I

Nip. 19720705 200112 1 003